

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN CADANGAN BERAS
PEMERINTAH DI KELURAHAN SIMPANG TIGA
KECAMATAN KUANTAN TENGAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

*Syarat mencapai Gelar Sarjana Sosial Disusun dan Diajukan Untuk
Melengkapi dan Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Sosial Program
Pendidikan Strata Satu Program Studi
Administrasi Negara*



OLEH:

**MARJAN
NPM. 210411042**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2025**

TANDA PERSETUJUAN

JUDUL : IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN CADANGAN BERAS
PEMERINTAH DI KELURAHAN SIMPANG TIGA
KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI

NAMA : MARJAN

NPM : 210411042

UNIVERSITAS : ISLAM KUANTAN SINGINGI

FAKULTAS : ILMU SOSIAL

JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA

PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I



DESRIADI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1022018302

PEMBIMBING II



RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
NIDN. 1030058402

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Universitas Islam Kuantan Singingi



EMILIA EMHARIS, S.Sos., M.Si
NIDN. 1002059002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH DI KELURAHAN SIMPANG TIGA KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”** yang dibuat untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (SI) pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi adalah karya sendiri dan bukan merupakan hasil tiruan atau duplikasi dari skripsi yang pernah dipergunakan untuk mendapat gelar keserjanaan di lingkungan Universitas Islam Kuantan Singingi maupun di perguruan tinggi atau instansi manapun, kecuali bagian informasinya yang dikutip dalam berbagai sumber sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, Juli 2025
Yang membuat pernyataan



METERAI TEMPEL
F95FAMX148435630
MARJAN
NPM. 210411042

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH DI KELURAHAN SIMPANG TIGA KECEMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Oleh:

MARJAN
NPM: 210411042

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sudah diterapkan dengan baik atau belum program bantuan cadangan beras pemerintah di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode kuantitatif, yaitu yaitu penelitian yang menekankan analisis pada data data *numerical* (angka) yang diolah dengan metode statistika sehingga dapat diperoleh dengan hasil penilaian terhadap setiap variabel. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara daftar pertanyaan atau kuesioner. Sedangkan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat penerima manfaat dan pegawai yang ada di Kelurahan Simpang Tiga. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Program Bantuan Cadangan Beras Pemerintah Di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sudah terimplementasi dengan baik.

Kata Kunci: Implementasi, Program pemerintah, Cadangan Beras

ABSTRACT**IMPLEMENTATION OF THE GOVERNMENT'S RICE RESERVE
ASSISTANCE PROGRAM IN SIMPANG TIGA VILLAGE, KUANTAN
TENGAH DISTRICT, KUANTAN SINGINGI REGENCY****By:****MARJAN
NPM:210411042**

This research was conducted at the Simpang Tiga Village Post Office, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency. This study aims to determine whether the government's rice reserve assistance program has been implemented properly or not at the Simpang Tiga Village Post Office, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency. The analysis used in this study is a quantitative method, namely the collected data is analyzed by describing and linking theories according to the existing problems, then interpreted against relevant results and conclusions are drawn and suggestions are given. While the population in this study were all employees at the Simpang Tiga Village Post Office. While the data collection techniques in this study were observation, interviews and documentation. Based on the results of research on the Implementation of the Government's Rice Reserve Assistance Program in Simpang Tiga Village, Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency, it has been implemented well.

Keywords: Implementation, Government Program, Rice Reserves

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	4
1.4.1. Manfaat Teoritis	4
1.4.2. Manfaat Praktis	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	6
2.1. Tinjauan Pustaka	6
2.1.1. Teori Ilmu Administrasi Negara	6
2.1.2. Teori Kebijakan	10
2.1.3. Teori Implementasi	14
2.1.4. Teori Organisasi.....	18
2.1.5. Teori Program Pemerintah.....	19
2.2. Kerangka Pemikiran	22
2.3. Hipotesis	22
2.4. Definisi Operasional.....	23
2.4.1. Komunikasi	23
2.4.2. Sumber Daya	23
2.4.3. Disposisi	23
2.4.4. Struktur Birokrasi	24
2.5. Operasional Variabel	24

BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1. Jenis Penelitian	25
3.2. Populasi dan Sampel	25
3.2.1. Populasi	26
3.2.2. Sampel.....	27
3.3. Sumber Data.....	28
3.3.1. Data Primer	28
3.3.2. Data Sekunder	29
3.4. Fokus Penelitian	29
3.5. Lokasi Penelitian	29
3.6. Metode Pengumpulan Data	29
3.6.1. Kuesioner	29
3.6.2. Observasi	30
3.6.3. Dokumentasi.....	30
3.7. Metode Analisis Data	30
BAB VI PENUTUP	77
6.1. Kesimpulan	77
6.2. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembagian beras cadangan oleh pemerintah merupakan langkah strategis dalam menangani masalah ketidakmampuan ekonomi di kalangan masyarakat. Program ini didesain untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses ke bahan pangan pokok, khususnya beras, tanpa menghiraukan latar belakang ekonomi mereka. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan dukungan kepada masyarakat yang kurang mampu, terutama dalam hal kebutuhan pokok seperti beras. Salah satu langkah yang diambil adalah pembagian beras cadangan. Tujuan utama dari pembagian beras cadangan ini adalah untuk mengurangi beban ekonomi bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu. Dengan menyediakan akses mudah dan terjangkau terhadap beras, pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memastikan bahwa kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Pemerintah biasanya menjalankan program pembagian beras cadangan melalui mekanisme distribusi yang teratur. Daftar penerima manfaat dipersiapkan dengan cermat untuk memastikan bahwa bantuan tersebut sampai kepada mereka yang membutuhkannya. Distribusi dapat dilakukan melalui kantor pos, pusat distribusi, atau kerjasama dengan toko-toko lokal.

Penerima manfaat dari program ini biasanya ditentukan berdasarkan kriteria ekonomi, seperti pendapatan keluarga yang rendah atau kondisi keuangan yang memerlukan bantuan. Pemerintah dapat melakukan survei atau mengandalkan data ekonomi yang sudah ada untuk menentukan kelompok sasaran. Pembagian

beras cadangan oleh pemerintah untuk masyarakat kurang mampu adalah langkah proaktif dalam mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi. Dengan memastikan akses yang adil dan merata terhadap bahan pangan pokok, pemerintah berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Program ini merupakan contoh nyata dari tanggung jawab sosial pemerintah dalam memastikan keberlanjutan kesejahteraan warganya, Berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 3 Ayat 5 adapun yang menjadi kriteria penerima manfaat yaitu :

1. Anggota keluarga Penerima Manfaat (KPM)
2. KPM yang sudah graduasi tetapi masih berstatus miskin dan atau tidak mampu
3. Keluarga miskin dan tidak mampu lainnya
4. Beralamat di lokasi desa atau kelurahan yang sama dengan alamat KPM yang terdaftar yang akan digantikan

Menurut, Badan Pusat Statistik (BPS) harga beras merangkak naik setiap tahunnya, hal tersebut yang menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan pokok. Sedangkan, pada kenyataannya pangan menjadi salah satu kebutuhan dasar paling penting manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Oleh karena itu, saat ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi atau mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia untuk menaikkan

kesejahteraan hidup masyarakat dan menjadikan Indonesia semakin lebih baik lagi. Salah satu program nasional yang baru-baru ini dilakukan oleh pemerintah yaitu Penyaluran Program Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dilakukan sesuai dengan instruksi Presiden RI, Joko Widodo, dan diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah sebagai bantuan untuk memenuhi kebutuhan pangan khususnya beras sebagai bentuk antisipasi dampak El Nino atau kekeringan yang mengakibatkan gagal panen sekaligus dalam rangka pengendalian inflasi.

Kabupaten Kuantan singingi khusus nya di Simpang Tiga teluk kuantan menjadi salah satu daerah yang menerima bantuan ini. Adapun bantuan pangan yang diberikan yakni beras 10 Kg/keluarga penerima manfaat(KPM) selama 3 kali pembagian yaitu bulan September, Oktober, dan November 2024.

Bantuan pangan ini berasal dari Badan Pangan Nasional bekerjasama dengan Bulog sebagai penyedia bantuan dan kantor pos sebagai penyalur bantuan. Di Kecamatan Kuantan Tengah, salah satunya Kelurahan Simpang Tiga yang merupakan salah satu tepat dimana Program Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ini dibagikan kepada masyarakat setempat. Penerima bantuan di Kelurahan Simpang Tiga pada bulan September, Oktober, November sebanyak 92 penerima.

Penyaluran bantuan ini dilakukan oleh penyaluran bantuan CBP, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (BPN) dan Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) memilih pihaknya sebagai mitra karena dinilai

mampu menyalurkan bantuan dengan tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran, dan akuntabel. Setiap desa di monitoring atau diawasi oleh satu orang staff dari PT. POS Indonesia guna memastikan penyaluran bantuan pangan berupa beras tersebut lancar tanpa ada kendala apapun. Dalam penelitian ini lokus penelitian ditetapkan pada Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi sebagai salah satu desa penerima bantuan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Tabel I.1 Jumlah Penerima Bantuan Cadangan Beras Pemerintah

No	Alamat	Jumlah Penerima/Bulan	Beras yang diterima/Bulan
1.	Kelurahan Simpang 3 Teluk Kuantan	92/Kartu Keluarga	10 Kg

Sumber: Kantor Kelurahan Simpang Tiga Teluk Kuantan

Dalam beberapa tahun terakhir, sering di temukan beras dengan kualitas yang kurang baik seperti tekstur beras kurang bagus dan warna beras yang diterima pun tidak sesuai dengan kualitas beras pada umumnya dan saya melihat masih banyak KPM yang menerima bantuan tersebut apakah penyaluran beras ini telah tepat sasaran sesuai dengan kriteria penerima yang telah ditentukan. Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti melakukan penelitian mengenai **“IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH DI KELURAHAN SIMPANG TIGA KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimanakah proses pelaksanaan Program Bantuan Cadangan Beras Pemerintah Di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut Untuk mengetahui seperti apa Implementasi Program Bantuan Cadangan Beras Pemerintah Di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi ?

1.4 Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari hasil penelitian ini yang dapat membantu peneliti maupun unsur yang terkait didalamnya, yakni:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1.4.1.1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Jurusan Ilmu Administrasi Negara.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Hasil penelitian ini dapat dijadikan input bagi staff Kantor Pos Kelurahan Simpang Tiga Taluk Kuantan sehingga dapat berdayaguna dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

1.4.2.2 Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi peneliti lebih lanjut dengan kajian lebih mendalam di bidang pelayanan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori Administrasi Negara

Secara konseptual administrasi merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan melalui usaha kelompok. Sebagai suatu konsep, administrasi adalah Universal Application. Administrasi ada bersamaan dengan munculnya umat manusia dan akan terus dipakai selama umat manusia itu masih hidup. Administrasi merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam setiap usaha kelompok dan menandai setiap usaha pencapaian tujuan secara kolektif. Sekalipun administrasi itu berbeda bentuknya, sesuai dengan sifat usahanya, namun secara substantial ia adalah sama.

Unsur-unsur administrasi pasti ada, sekalipun ia berada di masyarakat primitive. Ia akan bertambah canggih Bersama dengan bertambah maju dan kompleksnya masyarakat. Administrasi muncul karena kebutuhan manusia untuk bekerja sama. Manusia menyadari akan nilai kerja sama dari suatu kenyataan bahwa hanya dengan melalui kegiatan kolektif lah ia dapat memperoleh sesuatu yang tak dapat ia capai seorang diri.

Kerjasama menurut adanya pembagian kerja di antara anggotanya. Pembagian kerja ini diperlukan karena adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh manusia, seperti ketidakmampuan individu untuk berada di dua tempat ada waktu yang bersamaan, ketidakmampuan untuk menguasai berbagai

macam pengetahuan dan skill, serta ketidakmampuan untuk mengerjakan atau menyelesaikan tugas-tugas secara sempurna. Kesemuanya itu disebabkan oleh perbedaan skill, sifat, dan kapasitas individu.

Kemajuan teknologi telah memaksa secara imperative diadakannya pembagian kerja dan secara substantial telah meredusir pentingnya kemampuan individual di dalam organisasi. Metode pembagian kerja antar anggota ini didasarkan atas perbedaan kemampuannya yang disebabkan oleh factor keturunan dan factor lingkungan. Hasilnya adalah penggunaan kemampuan yang sangat efisien serta akan mengarah kepada spesialisasi keahlian.

Administrasi merupakan alat dan bukan merupakan tujuan. Dengan demikian, maka tujuan akhir administrasi tidak berbeda dengan tujuan akhir organisasi. Administrasi diciptakan untuk melayani organisasi dan keberadaannya tidak untuk keperluan lain. Agar dapat mencapai tujuan organisasi dengan baik, administrasi dituntut untuk menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka menengah.

Ini meliputi keteraturan aktivitas yang dilaksanakan, penyedia dan penggunaan sumber manusiawi dan material secara kebijaksana, pengurangan pemborosan dan inefisiensi, ekonomis di dalam operasi, kesejahteraan pegawai, kepuasan langganan, pemecahan masalah secara cepat dan lainlain. Tidak ada organisasi yang sukses dalam mencapai tujuannya tanpa dukungan administrasi yang efektif.

Dalam konteks yang agak luas, pencapaian tujuan ekonomi, sosial, politik, militer atau keagamaan dari suatu organisasi sangat tergantung pada administrasi yang efisien. Usaha kelompok bertanggung jawab untuk memajukan masyarakat dan sebaliknya kemajuan masyarakat ditunjang oleh administrasi yang berkelanjutan dan tertib. Administrasi yang efisien secara nyata memberikan andil yang sangat besar bagi suksesnya suatu organisasi dan akhirnya akan mengarah pada kemakmuran masyarakat. (Ekowanti dan Tamrin, 2022: 7-8).

Administrasi negara terdiri atas semua kegiatan negara untuk menunaikan dan melaksanakan kebijaksanaan negara (*public administration consist...all those operations having for the purpose the fulfilment and enforcement of public policy*) lebih lanjut, Atmosudirdjo melihat administrasi negara pada fungsinya yang lebih luas lagi, yaitu melaksanakan dan menyelenggarakan kehendak-kehendak (*strategy policy*) serta keputusan-keputusan pemerintah secara nyata (implementasi dan menyelenggarakan undang-undang menurut pasal-pasal nya sesuai dengan peraturan pelaksanaan yang ditetapkan).

Untuk memperjelas makna administrasi negara tersebut, Atmosudirdjo memerincinya dalam beberapa pengertian administrasi negara yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah sebagai berikut: Pertama, sebagai aparatur negara, aparatur pemerintahan, atau sebagai institusi politik (kenegaraan). Kedua, administrasi negara sebagai fungsi atau sebagai aktivitas melayani pemerintah, yaitu sebagai kegiatan pemerintah operasional. Ketiga, administrasi negara sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang.

Dari pengertian tersebut sesungguhnya pemaparan mengenai administrasi negara dapat dilihat dalam dua segi, yaitu: Pertama, administrasi negara sebagai organisasi dan kedua, administrasi yang secara khas mengejar tercapainya tujuan yang bersifat kenegaraan atau publik yang artinya tujuan-tujuan yang ditetapkan undang-undang secara *dwigend recht* (hukum yang memaksa). (Agus Hiplunudin, 2021: 22).

Administrasi negara merupakan sebuah sistem yang dipakai suatu negara guna membantu pemerintahan dalam melengkapi keperluan masyarakat. Pada kehidupan modern seperti saat ini, negara lebih mengarah untuk berusaha memenuhi keperluan masyarakat, terutama dalam permasalahan pelayanan kesejahteraan rakyat, maka dibutuhkan adanya administrasi negara untuk melaksanakan tugas – tugasnya tersebut.

Dalam dunia administrasi, unsur-unsur kunci yang sering diangkat oleh para ahli meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Perencanaan berperan sebagai landasan dalam menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi, sementara pengorganisasian memastikan bahwa sumber daya dan struktur organisasi disusun dengan efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Pengarahan melibatkan pemberian instruksi, motivasi, dan bimbingan kepada karyawan agar dapat bekerja secara optimal. Pengawasan memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan melakukan koreksi jika terdapat penyimpangan. Sementara itu, pengambilan keputusan menjadi inti dari setiap tahapan administrasi, di mana keputusan strategis diambil berdasarkan analisis mendalam untuk memastikan

efektivitas dan efisiensi organisasi. Secara keseluruhan, kelima unsur ini bekerja secara sinergis untuk memastikan operasional organisasi berjalan dengan lancar dan mencapai tujuannya. (Sahya, 2016: 1).

Menurut Suwarno (dalam Afifudin, 2015 : 3) Administrasi dalam arti sempit, yaitu berasal dari kata *Administratie* (bahasa Belanda) yang meliputi kegiatan catat mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik dan pencatatan pencatatan secara tertulis untuk didokumentasikan, agar mudah menemukannya bila diperlukan lagi, baik secara terpisah, maupun tidak terpisah, dan segala sesuatu yang bersifat teknis, ketatausahaan (*clerial work*) jadi pengertian administrasi sebagai ketatausahaan (*clerial work*) merupakan sebagian kecil dari administrasi.

Menurut Atmosudirjo (dalam ngusmanto, 2015: 15) administrasi adalah sesuatu yang terdapat dalam sesuatu organisasi tersebut, sehingga organisasi itu tidak dapat berkembang. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Suminta (dalam Pasolong, 2016:3) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan organisasi apapun bentuk organisasinya baik organisasi publik maupun organisasi bisnis.

2.1.2. Teori Kebijakan

Kebijakan Publik adalah keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik, kebijakan publik harus dibuat oleh otoritas politik, yaitu mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik di negara modern adalah pelayanan publik, yaitu segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak. (Engkus, 2022).

Kebijakan merupakan sebuah rangkaian aktivitas, aksi, sikap, rencana program dan keputusan yang dilakukan oleh para actor (pihak terkait) sebagai upaya dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. (Herdiana, 2018).

Dari berbagai kepustakaan, dapat diungkapkan bahwa kebijakan publik dalam kepustakaan internasional disebut sebagai *public policy*, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi. Nugroho R. (Uddin, 2017: 8).

Aturan atau peraturan tersebut secara sederhana kita pahami sebagai kebijakan publik. Jadi, kebijakan publik ini dapat kita artikan suatu hukum. Tidak hanya sekedar hukum, tetapi kita harus memahaminya secara utuh dan benar.

Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para pejabat yang berwenang.

Ketika kebijakan publik tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik, apakah menjadi Undang-Undang, apakah menjadi Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, termasuk Peraturan Daerah maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati.

Dengan demikian, kebijakan publik sangat berkait dengan administrasi negara ketika publik actor mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tugas dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat melalui berbagai kebijakan publik/umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara. Untuk itu, diperlukan suatu administrasi yang dikenal dengan “administrasi negara”. Terkait dengan kebijakan publik, menurut Thomas R. Dye penulis buku *Understanding Public Policy*, yang dikutip oleh Riant Nugroho D. adalah sarana untuk mencapai tujuan atau sebagai program yang di proyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai, dan praktik. Nugroho (Uddin, 2017: 9).

Menurut Said Zainal Abidin, alumni *University of Pittsburgh*, Pennsylvania, US, kebijakan publik biasanya tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Oleh karena itu, kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan-keputusan khusus dibawahnya. Said Zainal Abidin (Uddin, 2017: 10).

Menurut Nugroho dalam buku *Kebijakan Publik* (Uddin, 2017: 10) Kebijakan publik dalam praktik ketatanegaraan dan pemerintahan pada dasarnya terbagi dalam tiga prinsip, yaitu: pertama, dalam konteks bagaimana merumuskan kebijakan publik (formulasi kebijakan); kedua, bagaimana kebijakan publik tersebut diimplementasikan; dan ketiga; bagaimana kebijakan publik tersebut dievaluasi.

Akan tetapi, dari semua isu tersebut di atas menurut Said Zainal Abidin dalam buku *Kebijakan Publik* (Uddin 2017: 10), tidak semua mempunyai prioritas yang sama untuk diproses. Ini ditentukan oleh suatu proses penyaringan melalui serangkaian kriteria. Berikut ini kriteria yang dapat digunakan dalam menentukan salah satu diantara berbagai kebijakan:

- (1) Efektifitas, mengukur suatu alternatif sasaran yang dicapai dengan suatu alternatif kebijakan dapat menghasikan tujuan akhir yang diinginkan.
- (2) Efisien, dana yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang dicapai.
- (3) Cukup, suatu kebijakan dapat mencari hasil yang diharapkan dengan sumber daya yang ada.
- (4) Adil
- (5) Terjawab, kebijakan dibuat agar dapat memenuhi kebutuhan sesuatu golongan atau suatu masalah tertentu dalam masyarakat.

Adapun beberapa pengertian kebijakan publik menurut para ahli yang dikutip dalam buku *Kebijakan Publik* (Uddin, 2017: 34-35) diantaranya:

(1) Irfan Islamy

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

(2) Thomas R. Dye

Kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak untuk dilakukan.

(3) George C. Edwards III & Ira Sharkansky

Kebijakan publik adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah.

(4) W.I. Jenkins

Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling terkait yang ditetapkan oleh seseorang actor politik atau sekelompok actor politik berkenaan dengan tujuan yang dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi dimana keputusan-keputusan itu pada dasarnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor.

(5) James E. Anderson

Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.

(6) Chief J.O. Udoji

Kebijakan publik adalah suatu tindakan yang memiliki sanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat

2.1.3. Teori Implementasi

Pengertian mengenai implementasi kebijakan publik sangat beragam. Anderson mengemukakan bahwa: *"Policy implementation is the application by government's administrative machinery to the problems"* (Pelaksanaan kebijakan adalah aplikasi oleh mesin/badan administrasi pemerintah terhadap masalah-masalah) . Kemudian Edward III menjelaskan bahwa: *"Policy implementation is the stage of policy making between establishment of a policy and the consequences of the policy for the people whom it affects"* (pelaksanaan kebijakan adalah tahap pembuatan antara pembentukan sebuah kebijakan dan konsekuensi dari kebijakan untuk orang-orang yang terpengaruh atas kebijaksanaan tersebut). Penulis menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah penerapan hasil perumusan kebijakan yang ditujukan untuk masyarakat atau orang-orang yang terpengaruh atas kebijakan tersebut. Tahapan implementasi kebijakan dilakukan setelah tahap formulasi kebijakan publik. Dalam tahapan ini, apa-apa yang sudah dituliskan dalam formulasi akan diterapkan pada masyarakat luas. Tujuan dilaksanakan implementasi kebijakan menurut Riant Nugroho Dwijiwijoto "implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya". (Maranda, 2020:1).

Terdapat berbagai pendapat para ahli dan akademisi yang mengemukakan tentang pengertian dari implementasi. Hal ini perlu dijelaskan agar pemahaman tentang implementasi dapat disinkronisasikan dari konsep penelitian terhadap suatu kebijakan atau peraturan perundangan-undangan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Karena implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan. Adapun pengertian implementasi tersebut dapat dilihat dalam beberapa pendapat di bawah ini. Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

- (1) Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
- (2) Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
- (3) Ketersediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
- (4) Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.
- (5) Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
- (6) Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Implementasi menurut teori Jones (Mulyadi, 2015:45): “*Those Activities directed toward putting a program into effect*” (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan menurut Horn dan Meter: “*Those actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy*” (tindakan yang dilakukan pemerintah). Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Grindle (Mulyadi, 2015:47), “menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu”. Sedangkan Horn (Tahir, 2014:55), “mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”.

Gordon (Mulyadi, 2015:24) menyatakan, “implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.” Menurut Widodo (Syahida, 2014:10), “implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu”.

Sedangkan menurut Wahyu (Mulyadi, 2015:50), studi implementasi merupakan studi untuk mengetahui proses implementasi, tujuan utama proses implementasi itu sendiri untuk memberi umpan balik pada pelaksanaan kebijakan dan juga untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan telah sesuai dengan rencana

atau standar yang telah ditetapkan, selanjutnya untuk mengetahui hambatan dan problem yang muncul dalam proses implementasi.

Gunn dan Hoogwood (Tahir, 2014:55), “mengemukakan bahwa implementasi merupakan sesuatu yang sangat esensial dari suatu teknik atau masalah manajerial”.

Pressman dan Wildavsky (Syahida, 2014:8-9) mengemukakan bahwa: *“Implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete”* maksudnya: membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi. Jadi secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktifitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil”.

Menurut Syaukani dkk (Pratama, 2015:229), “merupakan salah satu tahap dalam proses kebijaksanaan publik dalam sebuah negara. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah dan panjang”.

2.1.4 Teori Organisasi

Burky dan Perry mengatakan bahwa organisasi adalah suatu kesatuan yang dibentuk oleh banyak orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama, Pengertian organisasi yang lain dapat kita temukan dalam buku Teori Organisasi yang mengatakan bahwa organisasi tercipta karena munculnya inspirasi. jelaskan itu Pada sekelompok orang yang mencapai tujuan tertentu. (Rais and Nasor 2023)

Teori organisasi adalah teori yang digunakan untuk mempelajari banyak cara menggunakan teori untuk menjelaskan proses kolaborasi antar individu, sifat kelompok dalam suatu organisasi, dan jenis perilaku mereka untuk mencapai tujuan. Seperti motivasi, individu bekerja sama dalam proses kolaboratif dalam organisasi. Teori organisasi para ahli :

1. Lubis dan Huseini dianggap sebagai kelompok ilmuwan yang membicarakan kerja sama antara dua orang atau lebih. Kemudian secara sistematis mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Stephen P Robbins menjelaskan pengertian konsep ini, dan karena merupakan ilmu yang mempelajari struktur dan desain organisasi, maka konsep ini terkait dengan aspek penjas dan perspektif ilmu tersebut. Teori struktur organisasi juga merupakan alat deskriptif untuk memperoleh kerangka kerja yang menggambarkan bagaimana organisasi harus disusun. (Rais and Nasor 2023)

Organisasi adalah suatu system perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi hanya merupakan alat dan wadah saja. (Malayu S.P Hasibuan, 2015:120). Organisasi adalah struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Pradjudi Admosudiro (Hasibuan, 2015:121).

Teori organisasi adalah studi tentang bagaimana banyak organisasi menjalankan fungsinya dan bagaimana mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang-orang yang bekerja didalamnya ataupun masyarakat di lingkup kerja

mereka. Pada skala yang lebih luas, kekayaan sumber daya sebuah masyarakat dalam ekonomi, sosial, dan budaya ditunjukkan oleh kecanggihan dan kerumitan organisasi dan institusi yang terbangun didalamnya. Oleh karena itu, studi tentang bagaimana banyak organisasi berfungsi dan difungsikan secara efektif berdampak pada laju pertumbuhan pembangunan sebuah bangsa di segala bidang. (Wisnu, 2019:7-8).

Dengan kata lain, peningkatan efektivitas kerja organisasi dan institusi secara langsung berpengaruh pada kenaikan kekayaan dan kemakmuran sebuah masyarakat ataupun bangsa itu sendiri. Setelah berakhirnya perang dingin, banyak negara Eropa Timur giat mengambil contoh struktur dan teknik berorganisasi negara-negara berkembang, karena mereka yakin bahwa negara-negara tersebut adalah kunci mereka menuju pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran budaya.

Teori organisasi mencari pemahaman tentang prinsip-prinsip yang membimbing bagaimana organisasi-organisasi beroperasi, berkembang, dan berubah. Fokusnya pada organisasi secara keseluruhan. Sebuah organisasi akan dinamis jika terpisah dari individu-individu dalam organisasi atau lingkungan dimana organisasi berada. Perilaku organisasi adalah hasil dari desain-desain dan prinsip-prinsip operasinya. Dari dalam, desain organisasi menekankan pada kelompok kerja dan individu untuk bersikap sebagaimana mestinya. Dari luar, desain tersebut menyebabkan anggota organisasi dapat mengamati dan memahami lingkungan secara berbeda. (Wisnu, 2019:16).

Organisasi merupakan sarana untuk menciptakan nilai yang dapat dipakai secara simultan oleh kelompok pengelola yang berbeda untuk mencapai tujuan

yang berbeda-beda pula. Kontribusi seluruh pengelola dibutuhkan dalam organisasi untuk bertahan dan mencapai misi menghasilkan barang dan jasa. Tiap kelompok pengelola termotivasi untuk berperan dalam organisasi dengan tujuan mereka sendiri, dan masing-masing kelompok mengevaluasi efektivitas organisasi dengan memutuskan apakah tujuan-tujuan khusus kelompoknya dapat di penuhi dengan baik. (Wisnu, 2019:18).

Teori organisasi merupakan sebuah teori untuk mempelajari kerjasama pada setiap individu. Hakekat kelompok dalam individu untuk mencapai tujuan beserta cara-cara yang ditempuh dengan menggunakan teori yang dapat menerangkan tingkah laku, terutama motivasi, individu dalam proses kerjasama. (Tanjung Amran Sahputra, Purba Anggi Martuah, and Muhammad Mahadir 2022)Teori Organisasi adalah teori yang berusaha memahami dan mempelajari sebaik mana organisasi bisa mencapai tujuan bersama yang diinginkan secara efektif dan efisien. Alasan mengapa Teori Organisasi itu penting adalah, karena dengan mempelajari teori organisasi umum. (Tanjung Amran Sahputra, Purba Anggi Martuah, and Muhammad Mahadir 2022)

Organisasi merupakan sebuah kesatuan sosial yang terbentuk dari adanya sekelompok individu yang saling berinteraksi antara satu sama lain yang membentuk suatu pola yang terstruktur dengan cara tertentu yang membuat setiap anggota yang ada di dalamnya memiliki tugas serta fungsinya masing-masing, menjadi kesatuan yang memiliki tujuan tertentu serta memiliki batas-batas yang jelas sehingga organisasi tersebut dapat secara tegas dipisahkan dari

lingkungannya. (Tanjung Amran Sahputra, Purba Anggi Martuah, and Muhammad Mahadir 2022)

2.1.5. Teori Program Pemerintah

Program pemerintah merupakan suatu bentuk upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan juga merupakan suatu kebijakan. Kebijakan adalah sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Berdasarkan pendapat Dwidjowijoyo (2015:57) ”kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dan peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun disepakati, yaitu disebut sebagai konvensi-konvensi”.

Upaya kebijakan untuk membangun desa antara lain dengan menargetkan Undang-Undang Desa untuk memajukan kesejahteraan desa dan memprioritaskan percepatan pembangunan daerah atau pedesaan. Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadi prioritas penting bagi pemerintahan Jokowi dimana desa bisa di berdayakan menjadi kekuatan besar yang akan memberikan kontribusi besar terhadap misi Indonesia yang berdaulat, sejahtera dan bermartabat. Kementrian Desa, dan Nawacita, sekaligus menghadapi dan mengatasi tantangan pelaksanaan Undang-Undang Desa.

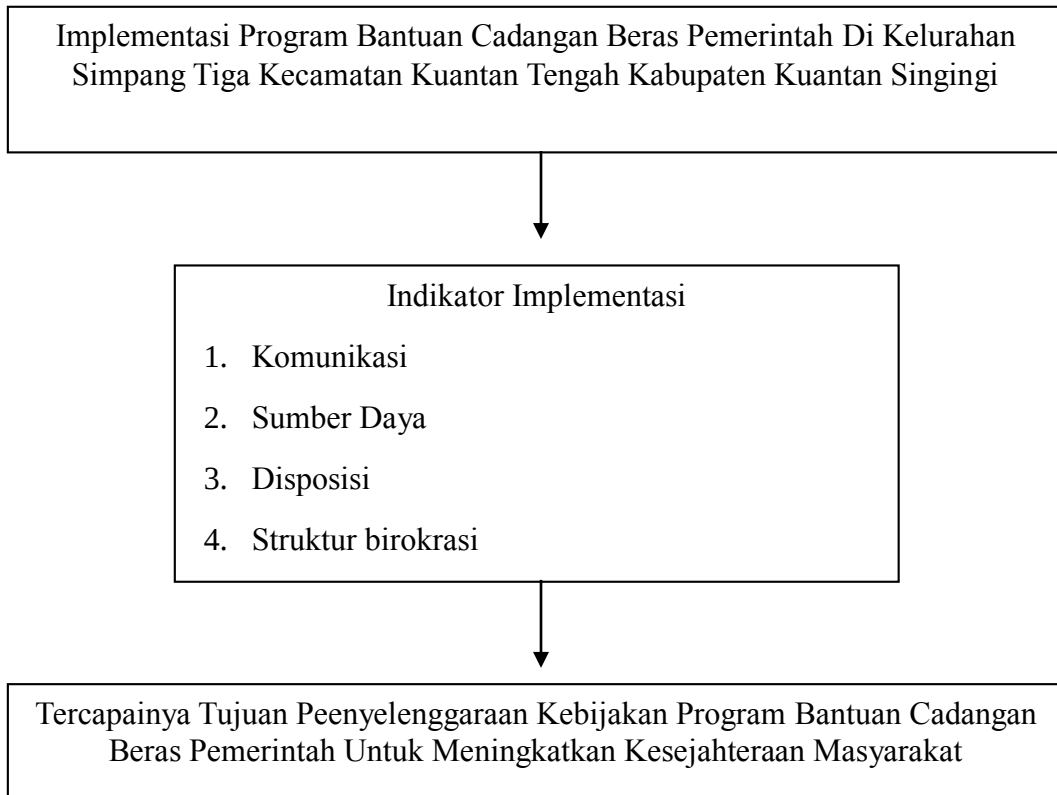
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Arah Kebijakan Bidang Desa dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional yaitu: menguatkan desa dan masyarakat desa serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di pedesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota dan pedesaan berkelanjutan, melalui:

- a) Pemenuhan SPM sesuai dengan kondisi geografis desa
- b) Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa
- c) Pembangunan sumber daya manusia, meningkatkan keberdayaan, dan modal sosial budaya masyarakat desa
- d) Penguatan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa
- e) Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan
- f) Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota.

Yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, dengan mendorong pembangunan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan.

2.2 Kerangka Pemikiran

II.1 Gambar Kerangka Pemikiran



Sumber: Modifikasi Penelitian Tahun 2024

2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara atau dugaan sementara yang masih perlu di buktikan kebenarannya. Sehingga dapat ditemukan suatu jawaban atau pendapat. Dugaan sementara yang penulis simpulkan berdasarkan observasi dalam penelitian ini adalah apakah seluruh KPM yang menerima beras sudah memenuhi kriteria yang telah di tetapkan pemerintah dan belum optimalnya Program Bantuan Cadangan Beras Pemerintah Di Kelurahan Sim pang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

2.4 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah pengertian dari indikator yang telah disebutkan seperti

2.4.1 Komunikasi

Diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

2.4.2 Sumber daya

Edward III mengemukakan bahwa faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya peralatan dan sumberdaya kewenangan.

2.4.3 Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (implementors) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai

kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

2.4.4 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures*) atau SOP. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawan dan menimbulkan red tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks . ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

2.5 Operasional Variabel

Tabel II.1 Operasional Variabel Penelitian

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
Implementasi Program Bantuan Cadangan Beras Pemerintah	Implementasi Program Bantuan Cadangan Beras Pemerintah di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi	Komunikasi	1. Arahan 2. Penyampaian 3. Sosialisasi
		Sumber Daya	1. Pendidikan 2. Tenaga kerja 3. Keuangan
		Disposisi	1. Sikap 2. Etika 3. Tingkat dukungan pelaksana terhadap kebijakam
		Struktur Birokrasi	1. Prosedur 2. Standar 3. Mekanisme implementasi

Sumber: Modifikasi Penelitian Tahun 2024

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. (Sugiono, 2014:88).

3.2. Populasi dan Sampel

3.2.1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. (Sugiono, 2014:119). Populasi yang menerima bantuan cadangan beras pemerintah di Kelurahan Simpang Tiga berjumlah 85 KPM. Dikarenakan populasi yang banyak, untuk mempermudah dalam memperoleh presentase jawaban tersebut maka penulis menentukan jumlah sampel dengan menggunakan rumus slovin sebagai berikut:

$$\text{Rumus Slovin: } n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana n : Jumlah Sampel

N : Populasi

E : Persepsi akibat kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir

(15,% = 0,15)

Dan rumus slovin diatas, maka sampel dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{92}{1 + 92(0,15)^2}$$

$$n = \frac{92}{2,0925}$$

$$n = 43,96$$

n= 44 Responden (digenapkan)

Berdasarkan perhitungan diatas, maka jumlah sampel yang ditetapkan sebanyak 44 kelompok penerima manfaat. Jumlah responden tersebut dianggap sudah representatif untuk memperoleh data penulisan yang mencerminkan keadaan populasi.

3.2.2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. (sugiyono, 2014:91). Dalam hal ini yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Lurah, pegawai kantor lurah, dan masyarakat Kelurahan Simpang Tiga Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan

Singingi. Untuk lebih jelasnya jenis populasi dan besarnya sampel yang diambil dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.1 Tabel Populasi dan Sampel

No	Sub Sampel	Populasi	Sampel	Persentase
1	Lurah	1	1	20%
2	Pegawai Kantor Lurah	3	3	30%
3	Masyarakat	92	44	50%
Jumlah		96	48	100%

Sumber: Modifikasi Penelitian 2024

Jadi, jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 48 kelompok penerima manfaat dan pegawai kantor lurah, dimana pengambilan sampel digunakan sampel *Random Sampling*, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Yang mana jumlah sampel untuk penelitian ini berjumlah. 48 kelompok penerima manfaat dan pegawai kantor lurah.

3.3. Sumber Data

Sumber Data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. Apabila peneliti misalnya menggunakan kuisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang

merespon atau menjawab pertanyaan, baik tertulis maupun lisan. (V.Wiratna Surjarweni, 2018:3).

3.3.1. Data Primer

Data Primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti ini juga melakukan survei dan wawancara dengan beberapa narasumber sesuai dengan keperluan penelitian. (Sugiyono, 2018:256).

3.3.2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang didapatkan dari catatan, buku, majalah, jurnal, artikel, buku-buku teori, dan sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi. Sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data. (V. Wiratna Surjarweni, 2018:6).

3.4. Fokus Penelitian

Tidak ada penelitian yang dapat dilakukan tanpa adanya fokus. Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Program Bantuan Cadangan Beras Pemerintah Di Kelurahan Simping Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

3.5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana suatu penelitian itu dilakukan. Adapun lokasi yang dapat digunakan dalam penelitian ini yaitu Di Kelurahan Simpang Tiga Teluk Kuantan.

3.6. Metode Pengumpulan Data

3.6.1. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau tertulis kepada responden untuk dijawabnya. (sugiyono, 2017:162).

3.6.2. Observasi

Mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan. (sugiyono, 2020:166).

3.6.3. Dokumentasi

Kata dokumentasi berasal dari bahasa latin yaitu *docore*, yang berarti mengejar. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku, internet, atau dokumen lain yang menunjang penelitian yang dilakukan. Dekomen merupakan catatan mengenai suatu peristiwa yang sudah berlalu. Peneliti mengumpulkan

dokumen yang dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang. (Sugiyono, 2014 : 240).

3.7. Metode Analisis Data

Setelah semua data yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data yang di data yang dipergunakan dalam penelitian ini, selanjutnya data diolah berdasarkan variabel berdasarkan indikatornya, disajikan dalam bentuk tabel, angka persentase, dan dilengkapi dengan uraian serta keterangan yang mendukung, kemudian di analisis dengan metode deskriptif kuantitatif, yaitu suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul secara menyeluruh tentang suatu keadaan atau permasalahan yang terjadi pada objek penelitian sebagaimana adanya. Manfaatnya memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan atau fakta-fakta lapangan kemudian mengambil kesimpulan serta disajikan dalam bentuk penelitian yang di dasarkan tata cara ilmiah. Untuk menjabarkan data kuantitatif dalam bentuk angka-angka, dijabarkan sebagai berikut.

$$\bar{X} = \frac{N}{F}$$

Keterangan :

$\bar{X}$ = Rata – Rata

N = Bobot

F = Jumlah Responden

Setelah data di olah dan di dapat hasilnya, untuk mngetahui hasil olahan data berada pada posisi dimana.

Dalam penelitian ini penulis menentukan banyak kelas interval sebesar 5,

Rumus yang digunakan sebagai berikut :

$$\text{Panjang interval} = \frac{\text{RENTANG}}{\text{Banyak kelas interval}}$$

Dimana :

Rentang = nilai tertinggi – nilai terendah

Banyaknya kelas interval = 5

$$\begin{aligned}\text{Panjang kelas interval} &= \frac{5-1}{5} \\ &= 0,8\end{aligned}$$

1,00 – 1,79 = Tidak baik

1,80 – 2,59 = Kurang baik

2,60 – 3,39 = Cukup Baik

3,40 – 4,19 = Baik

4,20 – 5,00 = Sangat Baik

Setelah data terkumpulkan, penulis memisahkan dan melaporkan data tersebut menurut jenisnya dan disajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan persentase. Dalam penelitian ini data dianalisa secara deskriptif kuantitatif yaitu memberikan gambaran secara umum mengenai variabel yang diteliti, dengan menganalisa secara seksama lalu menarik kesimpulan dan pada akhirnya memberikan saran-saran.

3.8. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 Jadwal Kegiatan

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu dalam Tahun 2024-2025																							
		Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul Proposal	x																							
2	Pembuatan Proposal		x	x																					
3	Bimbingan Proposal					x	x	x	x																
4	Seminar Proposal									x	x	x	x												
5	Revisi Proposal													x	x	x	x								
6	Pembuatan Skripsi																	x	x	x	x				
7	Bimbingan Skripsi																	x	x	x	x				
8	Sidang Skripsi																					x			
9	Revisi Skripsi																						x	x	x

Sumber: Modifikasi Penelitian Tahun 2025

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Implementasi Program Bantuan Cadangan Beras Pemerintah Di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi maka dapat disimpulkan bahwa penerapan program bantuan cadangan beras pemerintah sudah terlaksana dengan baik.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai, Implementasi Program Bantuan Cadangan Beras Pemerintah Di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi maka adapun saran saran yang diberikan sebagai berikut :

1. kepada pemerintah pusat maupun daerah untuk melakukan penambahan sumber daya pelaksana kepada pihak pemerintah kelurahan atau pendamping khusus Program Bantuan Cadangan Beras Pemerintah sehingga dapat membuat waktu distribusi dan waktu bagi menjadi lebih cepat dan terfokus.
2. Kepada pemerintah kelurahan dan pendukung Program Bantuan Cadangan Beras Pemerintah Di Kelurahan Simpang Tiga Teluk Kuantan untuk melakukan sosialisasi secara lebih menyeluruh dan dapat mengajak dusun, lingkungan dan RT serta RW yang belum mengikuti untuk ikut serta.

3. Kepada pelaksana program Bantuan Cadangan Beras Pemerintah Di Kelurahan Simpang Tiga untuk lebih tegas dan respon terhadap kebutuhan masyarakat dan melakukan pembaruan data KPM sehingga masyarakat yang menerima bantuan lebih tepat sasaran.

Kepada pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan bantuan beras yang berkualitas bagus sehingga dapat dikonsumsi oleh masyarakat yang menerima bantuan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Afifudin. 2015. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Alfabeta: Bandung
- Dwidjowijoyo. 2015. *Program Pemerintah*. Alfabeta: Bandung
- Engkus. 2022. *Kebijakan Publik (Konsep, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi serta Perubahan)*. PT Kimshafi Alung Cipta: Bekasi
- Gunawan, Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Hiplunudin Agus. 2021. *Etika Administrasi Negara*. CV. Andi Offset: Yogyakarta.
- Mulyadi, D. 2015. *Studi Kebijakan dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta: Bandung
- Ngusmanto. 2015. *Pemikiran dan Praktik Administrasi Pembangunan*. Mitra Wacana Media: Jakarta
- Pasolong, Harbani. 2016. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Sujarweni, V. W. (2014). *Metodelogi penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Perss.
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta
- Uddin, Sobirin. 2017. *Kebijakan Publik*. CV SAH MEDIA: Makassar
- Wisnu, Dicky U.R. 2019. *Teori Organisasi Struktur dan Desain*. UMM Press: Malang

Jurnal:

- Ekowanti, M. R. L., & Tamrin, M. H. (2022). Pengantar ilmu administrasi negara.
- Herdiana, D. 2018. Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik* 1(3): 17
- Maranda, H. (2020). *Teori dan Model Implementasi Kebijakan Publik*. April, 12-40
- Muspawi, M., & Claudia, P. R. (2018). Optimalisasi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Belajar di SMA Swasta Pelita Raya Kota Jambi. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 2(2), 180-192.
- Rais, W, and M Nasor. 2023. "Teori Organisasi Sumber Daya Manusia." *Unisan Jurnal* 02(09): 1–10. <http://journal.an-nur.ac.id/index.php/unisanjournal/article/download/1998/1485>.
- Sahya, A. 2016. Ilmu Administrasi Negara. *In CV. Pustaka Setia* (Vol. 53, Issue 9)
- Syahida. 2014. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Tanjung Pinang dalam Studi Kasus di Kelurahan Tanjung Unggat. *Jurnal Sosial*, 3 (2)
- Tanjung Amran Sahputra, Purba Anggi Martuah, and Muhammad Mahadir. 2022. "Pemahaman Terhadap Teori-Teori Organisasi." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4(4): 5816–23.

Undang-Undang:

- Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah
- Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 3 Ayat 5
- Undang-Undang No. 6 tahun 2016 Tentang Desa
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Arah Kebijakan Bidang Desa dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional